

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dimasa sekarang, perkembangan teknologi berkembang begitu pesat. Saat ini kita memasuki era Revolusi Industri 4.0. Di era Revolusi Industri 4.0 dimana berbagai macam inovasi buatan manusia bermunculan. Perkembangan teknologi saat ini mengalami kemajuan yang pesat sehingga diharapkan dapat mempermudah pekerjaan dan aktivitas masyarakat serta dapat mewujudkan transformasi digital. Di masa sekarang ini perkembangan teknologi sangat berpengaruh di segala aspek kehidupan manusia baik itu bidang pendidikan maupun pemerintahan. Transformasi digital dibutuhkan untuk mendukung kemajuan masyarakat, terutama untuk menunjang pekerjaan manusia dan kegiatan khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil. Pemerintah saat ini diharuskan untuk dapat memberikan pelayanan publik yang cepat, transparan dan akuntabel. Lembaga organisasi dan institusi harus mampu beradaptasi dan mengikuti kemajuan teknologi seiring dengan berkembangnya jaman. Transformasi digital saat ini penting untuk berjalannya sistem pemerintahan di seluruh dunia. Penggunaan teknologi yang dirancang dan dikembangkan digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan proses pemerintahan.

Di era yang sepenuhnya digital saat ini, smartphone memainkan peran positif di segala bidang dan dapat membantu pekerjaan manusia. Transformasi pemerintahan berbasis online juga merupakan Perubahan tata kelola pemerintahan dan budaya dalam membantu kita mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Kominfo selalu berupaya untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih kreatif dengan memunculkan beberapa temuan regulasi kunci. Rini Widiyanti, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Usaha Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, mengatakan ada strategi yang dijalankan untuk mengembangkan transformasi digital. Dengan adanya hal ini dapat mampu meningkatkan perbaikan-perbaikan birokrasi serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan transformasi digital akan kita perkuat melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Online sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 95 Tahun 2018. Salah satu sistem e-government berbasis online adalah penerapan absensi online di lembaga atau instansi. Mengingat pentingnya penerapan presensi online untuk mendukung produktivitas Pegawai Negeri Sipil, maka presensi

menjadi salah satu kunci yang perlu ditingkatkan sehingga pelayanan publik dapat berfungsi dengan baik, cepat dan efisien.

Dahlan dan Ariani (2013) menyatakan bahwa masih terdapat banyaknya temuan masalah-masalah yang terjadiketikamenggunakan sistem presensi secara manual, contohnya pada saat tidak masuk tanpa keterangan, pada saat datang dan pulang kantor atau tempat kerja tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, keluar ataupun pergi saat jam kerja tanpa ijin atau sepengetahuan atasan atau pimpinan dan masih banyak lain masalah lagi yang diakibatkan. Hal ini sangat buruk dan mempengaruhi kinerja karyawan.

Untuk membantu membangun tata kelola pemerintahan yang baik, teknologi dan sistem informasi harus diterapkan saat mengelola data pegawai, Muslikhah (2019). Dampak bagi instansi dan lembaga yang menggunakan teknologi dan sistem informasi untuk mengelola data pegawai adalah tersedianya informasi yang terkini dan akurat. Sehingga pengambilan keputusan yang efisien dapat meningkatkan kepercayaan publik. Aplikasi mobile absensi merupakan aplikasi yang dirancang untuk mencatat kehadiran pegawai di lingkungan Pemkab Jember. Aplikasi mobile absensi ini mengumpulkan serta mengolah data informasi setiap pegawai seperti nama, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai, yang secara teknis langsung dikirim dari aplikasi mobile absensi yang terkait dengan sistem informasi kepegawaian dan lokasi terakhir pengguna. Informasi atau data Pengguna terkumpul pada saat pengguna login ke aplikasi mobile absensi dengan memasukkan nama pengguna dan kata sandi yang terdaftar di aplikasi mobile absensi. Jika seorang karyawan ingin menerima kehadiran, mereka memerlukan akses ke lokasi. Aplikasi ini sangat membantu pemerintah untuk memantau kehadiran pegawai di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing. Sejumlah sanksi saat ini dikenakan untuk pelanggaran, namun tidak menimbulkan efek jera. Oleh karena itu, untuk memberikan pelayanan terbaik, para pegawai harus memiliki kualitas yang mengutamakan kedisiplinan di tempat kerja. Disiplin pemerintah merupakan faktor yang sangat penting dalam mencapai tujuan pemerintahan. Untuk mencegah upaya pelanggaran dan penipuan tanda tangan, pemerintah mengeluarkan kebijakan absensi berbasis android untuk menggantikan absensi manual yang sudah diterapkan. Kebijakan ini mengacu pada "Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dimana semua Pegawai Negeri Sipil harus menerapkan disiplin dan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut UU No. 3 Tahun 1999, tentang perubahan UU No. 8 Tahun 1974

tentang pokok-pokok kepegawaian, Peraturan disiplin kerja merupakan suatu peraturan yang mengatur keharusan, larangan dan sanksi jika kewajiban tidak dilaksanakan atau melakukan pelanggaran. Untuk menjamin ketertibandan lancarnya pelaksanaan tugas, maka Pegawai Negeri Sipil dikenakan tindakan disipliner dengan tidak mengurangi ketentuan KUHP.

Penggunaan daftar kehadiran mobile absensi seperti yang telah dijabarkan di atas dimana untuk membantu meningkatkan disiplin kerja karyawan. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 4 Tahun 2013 tentang disiplin kerja PNS Pada Bab 1V Pasal 11 Tentang Tata Tertib Tugas Pejabat: Pencatatan dalam buku absensi dilakukan satu kali pada saat pulang kerja dengan menggunakan sistem absensi online di satuan kerjamasing-masing.

Sistem presensi berbasis android atau mobile absensi inidigunakan sebab dapat lebih efektif dan efisien dibandingkan absensi manual atau sidik jari. Selain itu, sistem ini dinilai sangat efektif dan efisien karena dapat langsung diakses kapanpun dan dimanapun melalui jaringan internet. Hal ini dapat menghemat waktu, tenaga, dokumen atau kertas, dan sumber daya yang mengoperasikannya. Sehingga dapat dengan mudah melihat data laporan melalui perangkat lunak absensi online. (Husain dkk, 2017).

Namun yang menjadi permasalahan di Kabupaten Jember adalah aplikasi mobile absensi yang berbasis android masih seringkali mengalami gangguan (error), karena banyaknya pegawai yang menggunakan secara bersamaan sehingga dapat menghambat kelancaran dalam melakukan absen online. Selain itu, koneksi internet juga seringkali menjadi kendala dalam mobile absensi ini, sehingga banyak pegawai yang tidak dapat menggunakannya secara tepat waktu. Meskipun terdapat kekurangan dalam penggunaannya, namun mobile absensi ini memiliki kelebihan, yaitu pengisiannya dapat dilakukan dengan cara yang tidak curang atau rekayasa.

Setelah memperhatikan latar belakang yang telah dijabarkan penulis tentang penerapan mobile absensi penulis tertarik untuk meneliti penerapan absensi berbasis android/ mobile absensi yang berkaitan dengan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah penerapan mobile absensi dalam meningkatkan disiplin kerja PNS untuk mendorong transformasi digital pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan mobile absensi dalam meningkatkan disiplin kerja PNS untuk mendorong transformasi digital pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan gambaran tentang penerapan mobile absensi dalam meningkatkan disiplin kerja PNS untuk mendorong transformasi digital pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.
2. Untuk memberikan gambaran tentang kendala yang dihadapi dalam penerapan mobile absensi dalam meningkatkan disiplin kerja PNS untuk mendorong transformasi digital pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan sumbangan teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang ilmu pemerintahan.
2. Memberikan masukan kepada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember tentang penerapan mobile absensi dalam meningkatkan disiplin kerja PNS untuk mendorong transformasi digital.
3. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik yang sama.